



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# LAPORAN MONEY KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

## SEMESTER 1 2026

**Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Ternate**



## KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Informasi Publik sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada masyarakat luas serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas.

Akhir kata, semoga Informasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Ternate, 1 Juli 2026

Mengetahui,  
PPID PPN Ternate  
(Kepala PPN Ternate)



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Amirullah Sjahir, S.Pi, M.Si

Yang Membuat,  
Petugas/Operator PPID PPN Ternate  
(P3T Ahli Pertama)



Ditandatangani  
Secara Elektronik

M. Yusuf Ardiansyah, S.Pi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Dalam rangka mewujudkan hak atas informasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Mengenai mekanisme untuk mendapatkan informasi dapat dibaca pada artikel Mekanisme Keterbukaan Informasi Publik. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang perikanan tangkap, wajib menerapkan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good government).

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

### **1.2. Tujuan**

Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari monitoring dan evaluasi dimaksud yaitu penerapan kebijakan informasi publik di lingkup PPN Ternate dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di PPN Ternate mengacu kepada Surat Tugas Kepala PPN Ternate Nomor B.289/PPNT/TU.110/II/2026 tentang penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2025.

### **1.4. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. PP No.61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi//Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- j. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/PPID-DJPT/II/2026.
- k. Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Nomor B.289/PPNT/TU.110/II/2026 tentang penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2026.

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 2.1. Gambaran Umum

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di PPN Ternate mengacu kepada Surat Tugas Kepala Pelabuhan PPN Ternate Nomor B.289/PPNT/TU.110/II/2026 tentang penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2026. Klasifikasi informasi yang dimiliki oleh PPN Ternate, antara lain:

Tabel 1. Jenis dan Bentuk Informasi Publik dan Dokumentasi PPN Ternate

| No. | Jenis Informasi Publik                         | Bentuk Informasi dan Dokumentasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Informasi publik yang diumumkan secara berkala | 1. Profil PPN Ternate<br>2. Sejarah dan Kondisi Umum PPN Ternate<br>3. Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak<br>4. Struktur Organisasi<br>5. Visi dan Misi<br>6. LHKPN Pejabat<br>7. Informasi Jumlah dan Prosentase Pegawai PPN Ternate Wajib LHKASN Tahun<br>8. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)<br>9. Program dan Kegiatan yang Sedang Dijalankan<br>10. Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun<br>11. Rencana Aksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun<br>12. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate<br>13. Laporan Realisasi Anggaran PPN Ternate Tahun<br>14. Neraca PPN Ternate Tahun<br>15. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) PPN Ternate Tahun |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | <p>16. Daftar Aset dan Investasi PPN Ternate Tahun</p> <p>17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PPN Ternate Tahun</p> <p>18. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) PPN Ternate Tahun</p> <p>19. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima</p> <p>20. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan</p> <p>21. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Telah Disahkan atau Ditetapkan</p> <p>22. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik Disertai Informasi Waktu dan Syarat Permohonan</p> <p>23. Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik</p> <p>24. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat/jabatan di organisasi</p> <p>25. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>26. Informasi tentang kepegawaian</p> <p>27. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat</p> |
| 2. | Informasi publik yang tersedia setiap saat | <p>1. Daftar Informasi Publik</p> <p>2. Daftar Informasi yang Dikecualikan</p> <p>3. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan organisasi</p> <p>4. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan</p> <p>5. Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 6. Surat Menyurat Pimpinan<br>7. Persyaratan perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan<br>8. Data Perbendaharaan atau Inventaris<br>9. Rencana Strategis 2025 - 2029<br>10. Rencana Kerja (Renja) / Rencana Operasional Kegiatan (ROK) PPN Ternate 2025<br>11. Agenda Kerja Pimpinan Satker<br>12. Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik<br>13. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran; yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya<br>14. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya<br>15. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan<br>16. Volume dan nilai produksi Ikan di pelabuhan perikanan<br>17. Statistik/jumlah implementasi logbook penangkapan ikan di pelabuhan perikanan<br>18. Statistik/jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan<br>19. Sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan<br>20. Peta/masterplan pelabuhan perikanan<br>21. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PPN Ternate)<br>22. Informasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik PPN Ternate<br>23. Standar Layanan Informasi |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Informasi publik yang diumumkan secara serta merta | 1. Informasi Gempa Bumi<br>2. Informasi Potensi Cuaca Ekstrem<br>3. Larangan Pemasukan Ikan Jenis Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia<br>4. Informasi peta perkiraan daerah penangkapan ikan (offline dapat dilihat di Gedung Pelayanan Satu Atap PPN Ternate) |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PPN Ternate telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik dengan menetapkan pejabat dan petugas pelaksana pelayanan informasi serta dokumentasi sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate No. B.289/PPNT/TU.110/II/2026 tentang penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2026. Adapun kewajiban dan hak penyedia informasi yaitu:

1. Hak penyedia informasi yaitu berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan serta berhak menolak permohonan dan permintaan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan PPN Ternate;
2. Kewajiban penyedia informasi, antara lain:
  - a. Wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan;
  - b. Wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik;
  - c. Wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisiensi sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan dan cara sederhana.

## 2.2. Jenis dan Media Publikasi serta Informasi

Pada periode Semester 1 tahun 2026 telah dilakukan aktivitas penyebarluasan informasi melalui media elektronik berdasarkan jenis informasi publik sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis dan Media Publikasi Serta Informasi PPN Ternate

| Informasi Berkala |                                                                                                                                       |                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| No.               | Nama Informasi                                                                                                                        | Media Publikasi                         |
| 1                 | Profil PPN Ternate                                                                                                                    | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |
| 2                 | Sejarah dan Kondisi Umum PPN Ternate                                                                                                  | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |
| 3                 | Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak                                                             | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |
| 4                 | Struktur Organisasi                                                                                                                   | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |
| 5                 | Visi dan Misi                                                                                                                         | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |
| 6                 | LHKPN Pejabat                                                                                                                         | Website KKP, Website PPID               |
| 7                 | Informasi Jumlah dan Prosentase Pegawai PPN Ternate Wajib LHKASN Tahun                                                                | Website KKP, Website PPID               |
| 8                 | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)                                                                                                | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |
| 9                 | Program dan Kegiatan yang Sedang Dijalankan                                                                                           | Website KKP, Website PPID               |
| 10                | Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate                                                                              | Website KKP, Website PPID               |
| 11                | Rencana Aksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate                                                                                    | Website KKP, Website PPID               |
| 12                | Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate                                                                                 | Website KKP, Website PPID               |
| 13                | Laporan Realisasi Anggaran PPN Ternate                                                                                                | Website KKP, Website PPID               |
| 14                | Neraca PPN Ternate                                                                                                                    | Website KKP, Website PPID               |
| 15                | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) PPN Ternate                                                                                      | Website KKP, Website PPID               |
| 16                | Daftar Aset dan Investasi PPN Ternate                                                                                                 | Website KKP, Website PPID               |
| 17                | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PPN Ternate                                                                                  | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |
| 18                | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) PPN Ternate                                                                                      | Website KKP, Website PPID               |
| 19                | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima                                                                                      | Website KKP, Website PPID               |
| 20                | Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan | Website KKP, Website PPID, JDIH KKP     |
| 21                | Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Telah Disahkan atau Ditetapkan                                | Website KKP, Website PPID, JDIH KKP     |
| 22                | Tata Cara Memperoleh Informasi Publik Disertai Informasi Waktu dan Syarat Permohonan                                                  | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |
| 23                | Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik                                                       | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |

|                              |                                                                                                                    |                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 24                           | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat jajaran di organisasi          | Website KKP, Website PPID, Sosial Media                        |
| 25                           | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan                    | Website KKP, Website PPID, Sosial Media                        |
| 26                           | Informasi tentang kepegawaian                                                                                      | Website KKP, Website PPID                                      |
| 27                           | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat                                   | Website KKP, Website PPID, Sosial Media                        |
| <b>Informasi Setiap Saat</b> |                                                                                                                    |                                                                |
| 1                            | Daftar Informasi Publik                                                                                            | Website KKP, Website PPID                                      |
| 2                            | Daftar Informasi yang Dikecualikan                                                                                 | Website KKP, Website PPID                                      |
| 3                            | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan organisasi                                              | Website KKP, Website PPID, JDIH                                |
| 4                            | Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan                                              | Website KKP, Website PPID                                      |
| 5                            | Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga                                                                               | Website PPID                                                   |
| 6                            | Surat Menyurat Pimpinan                                                                                            | Website PPID                                                   |
| 7                            | Persyaratan perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan                                         | Website KKP, Website PPID, Sosial Media                        |
| 8                            | Data Perbendaharaan atau Inventaris                                                                                | Website KKP, Website PPID                                      |
| 9                            | Rencana Strategis 2025 - 2029                                                                                      | Website KKP, Website PPID, Sosial Media                        |
| 10                           | Rencana Kerja (Renja) / Rencana Operasional Kegiatan (ROK) PPN Ternate                                             | Website KKP, Website PPID                                      |
| 11                           | Agenda Kerja Pimpinan Satker                                                                                       | Website PPID, Sosial Media                                     |
| 12                           | Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik                                                             | Website KKP, Website PPID, Sosial Media                        |
| 13                           | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran; yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | Website PPID                                                   |
| 14                           | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya           | Website PPID                                                   |
| 15                           | Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan                                                                   | Website KKP, Website PPID, JDIH                                |
| 16                           | Volume dan nilai produksi Ikan di pelabuhan perikanan                                                              | Website KKP, Website PPID, Dashboard PPN Ternate, Sosial Media |
| 17                           | Statistik/jumlah implementasi logbook penangkapan ikan di pelabuhan perikanan                                      | Website KKP, Website PPID, Dashboard PPN Ternate, Sosial Media |
| 18                           | Statistik/jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan                                            | Website KKP, Website PPID, Dashboard PPN Ternate, Sosial Media |

|                              |                                                                                                                    |                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 19                           | Sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan                                                                        | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |
| 20                           | Peta/masterplan pelabuhan perikanan                                                                                | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |
| 21                           | Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PPN Ternate)                                                                  | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |
| 22                           | Informasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik PPN Ternate                                    | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |
| 23                           | Standar Layanan Informasi                                                                                          | Website KKP, Website PPID, Sosial Media |
| <b>Informasi Serta Merta</b> |                                                                                                                    |                                         |
| 1                            | Informasi cuaca dan maritim (offline dapat dilihat di Gedung Pelayanan Satu Atap PPN Ternate)                      | Online dan Offline                      |
| 2                            | Informasi peta perkiraan daerah penangkapan ikan (offline dapat dilihat di Gedung Pelayanan Satu Atap PPN Ternate) | Online dan Offline                      |

## BAB III

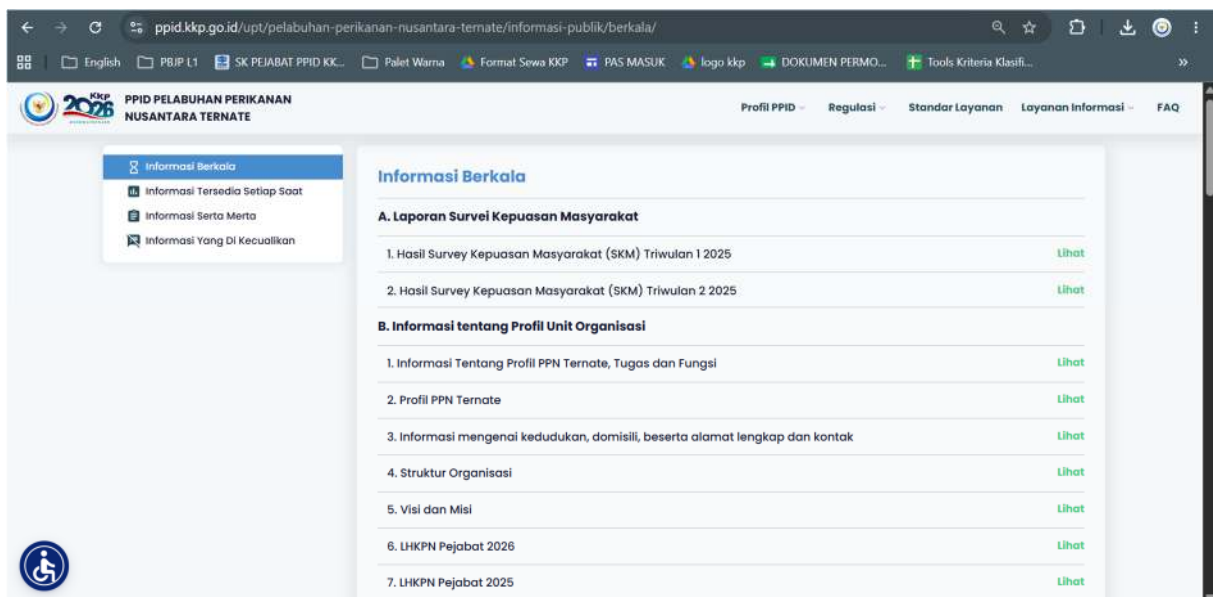
### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pembahasan

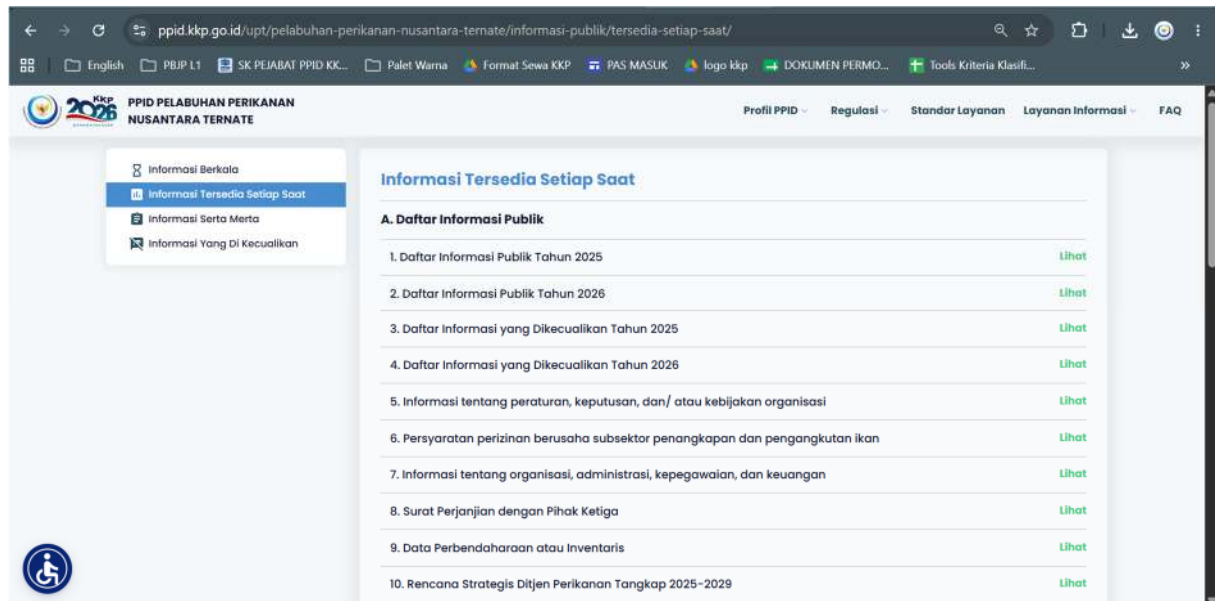
Pelaksanaan penyebarluasan informasi publik di PPN Ternate telah dilaksanakan sesuai dengan rencana berdasarkan jenis klasifikasi informasi. Adapun jenis-jenis informasi selain informasi yang dikecualikan telah di publikasikan melalui media elektronik dan media non elektronik. Penggunaan media elektronik dan non elektronik dilaksanakan dengan menyesuaikan pada kebutuhan pengguna layanan.

Dalam pelaksanaan tugas penyebarluasan informasi, khususnya jenis informasi yang disebarluaskan dengan media elektronik, adapun hasil Laporan terhadap publik dan informasi yang sesuai dengan jenis informasi publik dapat disampaikan sebagai berikut :

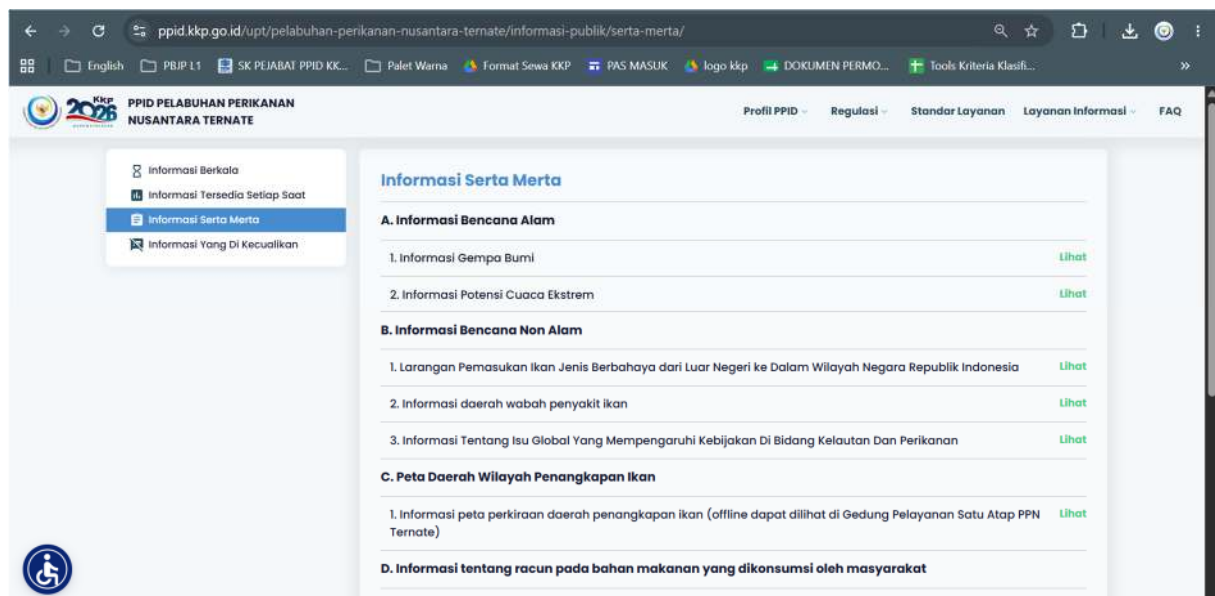
- Jenis Informasi Berkala telah dipublikasi pada website PPID PPN Ternate pada link: <https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-ternate/informasi-publik/berkala/>



- Jenis Informasi Tersedia Setiap Saat telah dipublikasi pada website PPID PPN Ternate pada link: <https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-ternate/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/>



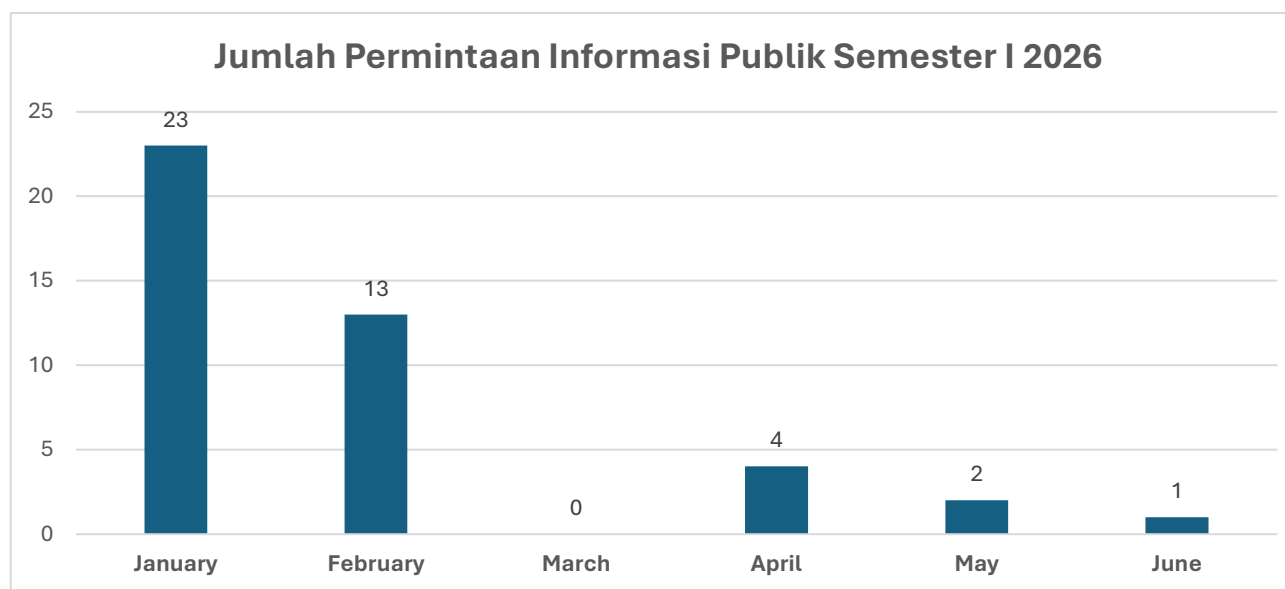
- Jenis Informasi Serta Merta telah dipublikasi pada website PPID PPN Ternate pada link: <https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-ternate/informasi-publik/serta-merta/>



### 3.2 Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik Periode Januari – Juni 2026

| Bulan         | Jumlah Permohonan Informasi |           |         | Alasan Ditolak | Waktu Penyelesaian Rata-Rata (hari) | Bentuk Informasi |       |        |
|---------------|-----------------------------|-----------|---------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------|--------|
|               | Jumlah Pemohon              | Diterima  | Ditolak |                |                                     | Cetak            | Rekam | Online |
| January       | 23                          | 23        | -       | -              | 3                                   | -                | -     | V      |
| February      | 13                          | 13        | -       | -              | 4                                   | -                | -     | V      |
| March         | 0                           | 0         | -       | -              | -                                   | -                | -     | V      |
| April         | 4                           | 4         | -       | -              | 6                                   | -                | -     | V      |
| May           | 2                           | 2         | -       | -              | 13                                  | -                | -     | V      |
| June          | 1                           | 1         | -       | -              | 2                                   | -                | -     | V      |
| <b>Jumlah</b> | <b>43</b>                   | <b>43</b> |         |                | <b>6</b>                            |                  |       |        |

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah permintaan informasi publik pada periode Semester 1 2026 sejumlah 43 permintaan informasi/data. Serta rata-rata waktu penyelesaian adalah 6 (enam) hari.



### **3.3 Kendala**

Selama periode semester 1 tahun 2026, terdapat kendala teknis seperti jaring internet yang sering error dan kecepatan cenderung menurun sehingga mengakibatkan kelancaran dalam menyajikan informasi publik tidak optimal.

### **3.4 Saran**

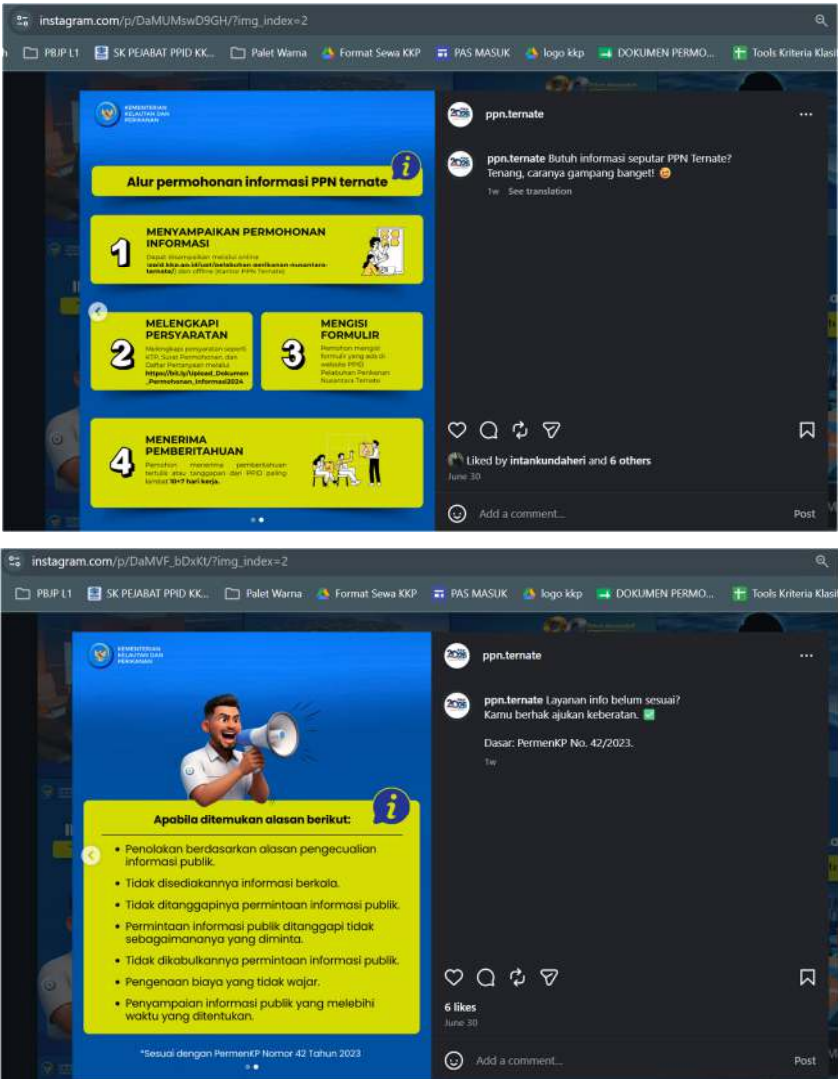
Pembaharuan atau *upgrade* jaringan internet agar pelayanan informasi dan publikasi informasi berjalan dengan optimal.

## BAB IV

### TINDAK LANJUT DARI MONEV SEBELUMNYA

Berdasarkan kendala/permasalahan yang ada pada Laporan Monitoring dan Evaluasi KIP Semester 2 tahun 2025, maka dapat dilihat dalam matrik dibawah ini antara rekomendasi yang ada dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan:

Tabel 3. Tindak Lanjut dari Monev Sebelumnya

| No. | Kendala Monev KIP Semester 2 Tahun 2025                                                                                              | Tindak Lanjut Monev KIP Semester 2 Tahun 2025                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Masih adanya internal pegawai dan stakeholder terkait keterbukaan informasi publik dan prosedur permintaan informasi di PPN Ternate. | <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Sosialisasi alur permohonan informasi melalui sosial media PPN Ternate</b> </li> </ul>  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian laporan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi periode Semester 1 Tahun 2026, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi pelaksanaan informasi publikasi.